

Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Etika Komunikasi Pemerintahan di Era Digital

ABSTRACT

The advancement of digital technology has profoundly transformed the way governments communicate with citizens, particularly through social media platforms and digital public services. Amid growing demands for transparency, responsiveness, and openness, it is essential that government communication adhere to ethical standards grounded in Pancasila. Unethical communication practices can undermine public trust, exacerbate political polarization, and facilitate the spread of misinformation in public policy implementation. The core values of Pancasila—humanity, unity, democracy, and social justice—serve as moral guidelines for developing government communication that is respectful, transparent, accurate, and accountable. Empirical studies indicate that the integration of Pancasila-based values into public communication enhances governmental credibility, strengthens public trust, and mitigates misinformation through official communication channels. Therefore, Pancasila must remain the ethical foundation of state communication to prevent informational bias and political manipulation.

Keyword: Pancasila; government communication; digital ethics; public service

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya melalui platform media sosial dan layanan publik digital. Di tengah meningkatnya tuntutan akan transparansi, kecepatan penyampaian informasi, dan keterbukaan layanan, pemerintah perlu berpegang pada prinsip etika komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Praktik komunikasi pemerintah yang tidak beretika berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, memperuncing polarisasi politik, serta menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian kebijakan publik. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, menjadi pedoman utama dalam membangun komunikasi pemerintah yang santun, transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi publik mampu meningkatkan kredibilitas pemerintah, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mencegah penyebaran hoaks melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi landasan moral dalam setiap bentuk komunikasi negara agar terhindar dari konflik kepentingan politik dan penyampaian informasi yang bias.

Kata Kunci: Pancasila; komunikasi pemerintah; etika digital; pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, seperti situs resmi, media sosial, dan aplikasi layanan publik. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk berkomunikasi secara lebih cepat, transparan, dan akurat guna memenuhi kebutuhan publik yang dinamis. Namun demikian, komunikasi digital pemerintah kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, misinformasi, serta manipulasi opini publik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman fundamental dalam menjaga etika dan integritas komunikasi pemerintah. Hasan et al. (2025) menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan moral yang harus menjadi dasar perilaku komunikasi negara dalam menghadapi dinamika digital yang kompleks (Hasan et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan oleh instansi pemerintah untuk membangun komunikasi yang profesional dan beretika. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya praktik komunikasi yang bias dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, implementasi Pancasila menjadi suatu urgensi dalam mewujudkan komunikasi pemerintahan yang sehat dan berintegritas.

Era digital juga menuntut pemerintah untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang secara cepat melalui interaksi daring. Akan tetapi, tanpa pedoman etika yang kuat, respons yang serba cepat tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan komunikasi yang dapat berujung pada mispersepsi publik. Penelitian Rahman et al. (2024) menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila mampu membentuk perilaku komunikasi yang lebih bertanggung jawab di kalangan aktor-aktor publik (Rahman et al., 2024). Nilai-nilai kemanusiaan dan kerakyatan menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis serta aspirasi masyarakat. Dalam situasi ketika masyarakat semakin rentan terhadap hoaks dan manipulasi informasi, pemerintah memerlukan landasan moral yang mampu menuntun perilaku komunikasinya. Elizabeth (2022) menyatakan

bahwa Pancasila, sebagai ideologi terbuka, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi pemerintahan modern. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus diaktualisasikan dalam praktik komunikasi pemerintahan (Elizabeth, 2022).

Komunikasi pemerintah yang tidak etis dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan publik sangat bergantung pada akurasi, transparansi, dan kejujuran informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila memberikan landasan moral untuk membangun komunikasi yang jujur, santun, dan tidak merugikan pihak lain (Hasan, 2025) (Hasan et al., 2025). Penelitian Juita (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu meredam konflik komunikasi dalam situasi krisis (Juita, 2024). Selain itu, Ladamay dan Mustakim (2023) menemukan bahwa empati dalam komunikasi dapat ditingkatkan melalui internalisasi nilai Kemanusiaan (Ladamay & Mustakim, 2023). Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat relevan dalam konteks komunikasi digital pemerintahan.

Tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks seiring dengan berkembangnya platform digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dan waktu nyata dengan lembaga negara. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, interaksi langsung tersebut menuntut penerapan etika komunikasi yang lebih ketat guna mencegah terjadinya kesalahan informasi. Ikrom et al. (2023) menemukan bahwa penerapan nilai musyawarah dalam komunikasi publik dapat meningkatkan kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat (Ikrom et al., 2023). Nilai Kerakyatan menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena menekankan pentingnya dialog terbuka yang dilandasi rasa hormat dan kebijaksanaan. Hasan dan Pradhana (2024) juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman normatif dalam komunikasi digital pemerintah (Levina & Purnomo, 2023). Oleh karena

itu, nilai-nilai Pancasila perlu tertanam secara konsisten dalam setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Era digital juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya disinformasi yang beredar di ruang publik, yang kerap memengaruhi efektivitas komunikasi pemerintah. Apabila pemerintah tidak mampu mengimbangi disinformasi tersebut dengan strategi komunikasi yang tepat, persepsi publik terhadap kebijakan negara berpotensi mengalami distorsi. Penelitian Wardhani dan Utami (2023) menunjukkan bahwa penerapan nilai Persatuan dalam pendidikan mampu mengurangi polarisasi dalam penyampaian informasi (Wardhani & Utami, 2023). Sementara itu, Maulid et al. (2024) menegaskan bahwa literasi digital perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah yang berlandaskan Pancasila dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menangkal misinformasi sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan public (Maulid et al., 2024). Nilai-nilai tersebut memastikan bahwa informasi disampaikan secara akurat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Komunikasi pemerintah di era digital juga menuntut keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan data publik. Dalam proses penyampaian informasi, pemerintah harus berhati-hati agar tidak melanggar hak privasi warga negara. Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila menuntut pemerintah untuk bertindak adil dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Penelitian Sudharmono (1995) menegaskan bahwa Pancasila, sebagai ideologi terbuka, dapat dijadikan landasan dalam merespons tantangan etika modern (Sudharmono, 1995). Selain itu, Levina dan Purnomo (2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Pancasila mampu meningkatkan partisipasi publik dalam komunikasi pemerintahan (Levina & Purnomo, 2023). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi penting bagi pemerintah dalam menjaga perlindungan data publik serta mewujudkan komunikasi yang adil dan bertanggung jawab.

Selain tantangan internal, pemerintah juga menghadapi tekanan dari dinamika politik digital yang dapat memengaruhi kualitas komunikasi publik.

Polarisasi politik yang berkembang di ruang digital sering kali melahirkan narasi yang bias, bahkan manipulatif. Penelitian Nabila et al. (2023) menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat mengurangi kecenderungan penyebaran informasi yang tidak objektif (Nabila et al., 2023). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Hasan et al. (2025) yang menyatakan bahwa Pancasila berperan penting dalam menjaga integritas komunikasi pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan di kalangan aparatur negara guna menjaga stabilitas dan kualitas informasi publik.

Pemerintah dituntut untuk senantiasa bersikap adaptif dalam menyesuaikan metode komunikasi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Namun demikian, adaptasi yang tidak berlandaskan nilai dasar berpotensi menimbulkan perubahan kebijakan komunikasi yang tidak konsisten. Elizabeth (2022) menjelaskan bahwa nilai keterbukaan dalam Pancasila dapat dijadikan prinsip dalam mengevaluasi strategi komunikasi pemerintah. Selain itu, Murdiono et al. (2017) menemukan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila mampu memperkuat kapasitas komunikasi yang beretika. Dengan demikian, pemerintah perlu menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam proses adaptasi komunikasi digital (Murdiono et al., 2017). Prinsip ini berperan penting dalam menjamin konsistensi etika komunikasi negara.

Pemanfaatan media sosial resmi pemerintah memberikan peluang besar untuk meningkatkan kedekatan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi sekaligus mengandung risiko kesalahan komunikasi yang dapat menyebar secara cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan standar komunikasi berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral bagi aparatur negara. Rahman et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi nilai Kerakyatan dalam komunikasi digital dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, penelitian Maulidia dan Alfiansyah (2024) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila mampu meningkatkan kepekaan sosial dalam komunikasi digital (Maulidia & Alfiansyah, 2024). Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas serta efektivitas

komunikasi publik. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai filter moral dalam praktik komunikasi pemerintah.

Berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah di era digital, Pancasila memiliki peran fundamental sebagai landasan etika komunikasi publik. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk membangun komunikasi pemerintah yang bermoral, akurat, dan responsif. Hasan (2025) menekankan bahwa Pancasila merupakan pedoman moral yang harus diaktualisasikan dalam seluruh aktivitas pemerintahan. Berbagai penelitian lainnya juga membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, integrasi Pancasila dalam komunikasi digital pemerintah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan komunikasi publik yang beradab, demokratis, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksitas risiko komunikasi digital yang semakin meningkat. Oleh karena itu, implementasi Pancasila harus diprioritaskan dalam tata kelola komunikasi pemerintah di era modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan etika komunikasi pemerintahan di era digital. Permasalahan tersebut mencakup bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan normatif dalam pembentukan etika komunikasi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan komunikasi digital yang beretika, termasuk maraknya disinformasi, polarisasi opini publik, serta tuntutan transparansi dan kecepatan informasi. Fokus kajian selanjutnya diarahkan pada peran nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih empatik, inklusif, dan demokratis. Penelitian ini juga mengkaji strategi yang dapat ditempuh untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik komunikasi digital pada instansi pemerintah. Pada akhirnya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Pancasila dalam komunikasi pemerintahan dapat berkontribusi dalam

meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif–empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma etika dengan fakta empiris mengenai praktik komunikasi digital pemerintah di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis literatur akademik tentang Pancasila, etika komunikasi publik, serta pemikiran Hasan (2025) mengenai peran Pancasila sebagai landasan moral penyelenggaraan negara. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip etis yang relevan bagi komunikasi digital pemerintahan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang membahas komunikasi digital, literasi publik, dan efektivitas penyebaran informasi pemerintah di berbagai platform digital, sebagaimana terlihat pada studi Juita (2024), Rahman et al. (2024), dan Nabila et al. (2023). Kajian empiris ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan komunikasi digital pemerintah, seperti hoaks, polarisasi, dan rendahnya literasi etis masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan analisis komprehensif mengenai urgensi implementasi Pancasila dalam membangun komunikasi digital pemerintah yang beradab. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian memadukan nilai filosofis dan realitas sosial sehingga hasilnya relevan dengan kebutuhan pemerintahan masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Ketuhanan sebagai Dasar Kejujuran dan Integritas dalam Komunikasi Pemerintah

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas moral yang harus menjadi pedoman utama dalam praktik

komunikasi pemerintah di era digital. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi krisis. Prinsip ini menjadi sangat penting mengingat komunikasi pemerintah kerap dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kesalahan informasi dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial. Hasan (2025) menegaskan bahwa nilai Ketuhanan dalam Pancasila berfungsi sebagai kontrol moral agar negara tidak terjebak dalam praktik manipulasi informasi, terutama ketika informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, nilai Ketuhanan menuntut pemerintah untuk senantiasa menjaga kejujuran dan integritas dalam seluruh aktivitas komunikasi digitalnya. Prinsip ini menjadi fondasi etis dalam membangun komunikasi pemerintahan yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sekaligus mencegah praktik komunikasi yang merugikan publik.

Dalam konteks komunikasi melalui media digital, nilai Ketuhanan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap unggahan, pernyataan, dan rilis informasi dilakukan dengan itikad baik, bukan untuk menimbulkan keresahan atau memprovokasi masyarakat. Penelitian Rahman et al. (2024) menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai moral berbasis Pancasila berkontribusi signifikan dalam membentuk perilaku komunikasi yang lebih etis di kalangan aparatur negara, terutama ketika menghadapi tekanan birokrasi dan dinamika politik. Selain itu, integritas yang berpijak pada nilai Ketuhanan dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat yang berpotensi merusak wibawa pemerintah. Pemerintah yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan akan lebih berhati-hati dalam memilih bahasa, narasi, serta metode penyampaian informasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan memiliki relevansi yang tinggi dalam membangun komunikasi digital yang beradab. Dengan penerapan nilai tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, nilai Ketuhanan menjadi pilar utama dalam membentuk komunikasi digital pemerintahan yang bertanggung jawab.

Nilai Kemanusiaan dalam Membentuk Komunikasi Pemerintah yang Empatik

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah agar lebih responsif dan empatik terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks digital, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi secara faktual, tetapi juga untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial, psikologis, dan emosional masyarakat. Penelitian Ladamay dan Mustakim (2023) menunjukkan bahwa internalisasi nilai kemanusiaan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui praktik komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengedepankan rasa hormat dan empati. Hal ini menjadi penting mengingat interaksi digital cenderung bersifat impersonal, sehingga pilihan bahasa dan gaya komunikasi pemerintah sangat memengaruhi persepsi publik. Nilai Kemanusiaan juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, nilai ini memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas komunikasi digital pemerintah.

Selain itu, nilai Kemanusiaan berperan penting dalam mencegah praktik komunikasi pemerintah yang bersifat diskriminatif, kasar, atau menyinggung kelompok tertentu. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat seluruh warga negara, yang dapat diwujudkan melalui komunikasi yang ramah, inklusif, dan bebas dari unsur kekerasan verbal. Wardhani dan Utami (2023) menyatakan bahwa penguatan nilai kemanusiaan dalam pendidikan komunikasi mampu meningkatkan kepekaan sosial para pemangku kepentingan pemerintahan dalam interaksi publik. Nilai ini membantu memastikan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga bersifat humanis dan menghargai hak-hak warga negara. Dalam era digital, ketika setiap pesan pemerintah berpotensi menyebar secara cepat dan luas, penerapan nilai Kemanusiaan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, komunikasi pemerintah perlu senantiasa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap aktivitas komunikasinya.

Nilai Persatuan sebagai Benteng terhadap Polarisasi Digital

Media digital kerap menjadi ruang terjadinya polarisasi politik dan sosial yang berpotensi melemahkan stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, nilai Persatuan Indonesia memiliki peran strategis dalam mengarahkan komunikasi pemerintah agar bersifat moderatif dan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Penelitian Juita (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Persatuan, mampu meredam konflik komunikasi yang muncul akibat perbedaan pandangan ideologis maupun politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak memperuncing perpecahan, melainkan mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif. Nilai Persatuan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial melalui praktik komunikasi yang tidak berpihak pada kelompok tertentu. Dengan berlandaskan nilai tersebut, pemerintah dapat berperan aktif dalam menurunkan tingkat ketegangan sosial. Nilai Persatuan menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam komunikasi digital yang rentan terhadap konflik dan fragmentasi sosial.

Dalam menghadapi polarisasi digital, pemerintah perlu mengedepankan narasi yang inklusif, menenangkan, dan berorientasi pada kepentingan bersama guna mencegah eskalasi konflik. Elizabeth (2022) menegaskan bahwa prinsip keterbukaan dalam Pancasila dapat membantu negara menavigasi perbedaan pandangan masyarakat tanpa menimbulkan ketegangan baru. Penerapan nilai tersebut dalam komunikasi pemerintah berperan penting dalam menyeimbangkan persepsi publik terhadap isu-isu sensitif. Hasan et al. (2025) juga menyatakan bahwa nilai Persatuan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika digital yang terus berkembang, sehingga layak dijadikan pedoman dalam komunikasi pemerintah. Dengan demikian, nilai Persatuan menjadi elemen kunci dalam menata komunikasi publik yang harmonis, sekaligus memperkuat integritas dan stabilitas sosial di era digital.

Nilai Kerakyatan sebagai Dasar Komunikasi Publik yang Demokratis

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan memberikan landasan etis bagi pemerintah dalam membangun komunikasi digital yang partisipatif dan demokratis. Pemerintah dituntut untuk mampu mengajak masyarakat berdialog secara terbuka, mengakomodasi kritik, serta menyediakan ruang yang aman bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Penelitian Ikrom et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan nilai musyawarah dalam Pancasila dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks digital, nilai ini membimbing pemerintah agar tidak mengabaikan suara publik, termasuk kritik yang disampaikan melalui media sosial. Pemerintah juga perlu mengelola dialog publik secara bijaksana agar interaksi digital tidak berkembang menjadi perdebatan yang destruktif. Oleh karena itu, nilai Kerakyatan memiliki peran strategis dalam memperkuat praktik demokrasi digital di Indonesia.

Selain itu, nilai Kerakyatan berkontribusi dalam menciptakan ruang komunikasi digital yang produktif melalui mekanisme partisipasi publik yang sehat. Levina dan Purnomo (2023) menjelaskan bahwa nilai musyawarah berfungsi sebagai instrumen untuk memoderasi komunikasi, sehingga perbedaan pendapat dapat dikelola secara bijak dan tidak berkembang menjadi konflik. Dalam praktik komunikasi digital, nilai ini mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menerima masukan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik secara luas. Dengan menerapkan nilai Kerakyatan, pemerintah dapat memperkuat kedekatan dengan masyarakat digital yang semakin kritis dan aktif dalam isu-isu publik. Selain itu, nilai ini juga mendukung terwujudnya komunikasi publik yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, nilai Kerakyatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam praktik komunikasi digital pemerintah.

Nilai Keadilan Sosial sebagai Prinsip Tanggung Jawab dan Keterbukaan Informasi

Nilai Keadilan Sosial menekankan pentingnya pemerataan akses informasi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks komunikasi pemerintah, nilai ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan tidak diskriminatif, terutama apabila informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Maulid et al. (2024) menegaskan bahwa literasi digital yang diintegrasikan dengan nilai Keadilan Sosial mampu meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah. Hal ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi yang bias atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, nilai Keadilan Sosial juga menuntut pemerintah untuk menjaga keterbukaan data publik secara proporsional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap privasi masyarakat. Dengan demikian, nilai ini memastikan bahwa komunikasi pemerintah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila telah terbukti efektif dalam membentuk sikap tanggung jawab, baik pada tingkat individu maupun institusi, termasuk dalam praktik komunikasi digital pemerintah. Murdiono et al. (2017) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila mampu menanamkan landasan moral yang kuat, sehingga informasi publik dapat disampaikan secara adil, objektif, dan bijaksana. Di sisi lain, penelitian Nabila et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai Keadilan Sosial berperan dalam meningkatkan akuntabilitas komunikasi pemerintah dalam merespons berbagai isu sosial. Melalui penerapan nilai ini, pemerintah dapat membangun komitmen yang kuat untuk menyampaikan informasi yang tidak merugikan masyarakat. Nilai Keadilan Sosial juga memastikan bahwa komunikasi publik dijalankan demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, nilai Keadilan Sosial menjadi pedoman yang esensial dalam tata kelola komunikasi pemerintah.

KESIMPULAN

Penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan aspek fundamental dalam membangun etika komunikasi pemerintah di era digital yang sarat dengan tantangan. Nilai Ketuhanan mendorong praktik komunikasi yang jujur dan berintegritas, nilai kemanusiaan menekankan pentingnya empati, nilai Persatuan berperan dalam meredam polarisasi sosial, nilai Kerakyatan memperkuat dialog yang demokratis dan partisipatif, serta nilai Keadilan Sosial menjamin pemerataan akses terhadap informasi publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi digital pemerintah mampu meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Hasan (2025) serta Hasan et al. (2025) menegaskan bahwa Pancasila harus dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam praktik komunikasi digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan tata kelola informasi publik yang beretika, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi Pancasila dalam komunikasi pemerintah merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Elizabeth, V. (2022). Makna keterbukaan dalam Pancasila. *Perspektif Hukum*, 22(1), 80–108.
- Hasan, Z., Setiawan, F. R., Syahrezal, S., Putra, M. I., Devary, A., Satya, F. Y., & Berlando, M. M. (2025). Relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi dan moral bangsa Indonesia. *JMIA*, 2(6), 287–298.
- Ikrom, M., Zania, B., & Maulia, S. T. (2023). Pancasila sebagai dasar negara. *Civilia*, 2(1), 112–122.
- Juita, J. (2024). Transformation of character education in Indonesia. *Jurnal Setia Pancasila*.

- Ladamay, O. M. A., & Mustakim. (2023). Character building in Pancasila perspective. *Waskita*.
- Levina, A., & Purnomo, H. (2023). Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. *Attadrib*, 6(2).
- Maulid, A., Hermawan, H., Wulandari, R., Prabowo, R., Fanny, T., & Nurlaili, L. (2024). Literasi digital dan Pancasila. *KMM*, 4(2), 121–125.
- Maulidia, D. W. H., & Alfiansyah, I. (2024). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Pancasila. *Pendas*, 10(2).
- Murdiono, M., Miftahuddin, & Kuncorowati, P. W. (2017). The education of national character of Pancasila in secondary school. *Cakrawala Pendidikan*, 36(3).
- Nabila, A. A., Yusuf, M. F., Rafi, M., Rahmawan, W. F., & Antoni, H. (2023). Pendidikan karakter berbasis Pancasila. *JKPU*.
- Rahman, M. H., Sulianti, A., & Isyuniandri, D. (2024). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Pancasila. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1).
- Sudharmono. (1995). Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Jurnal Filsafat*.
- Wardhani, D. K., & Utami, Y. (2023). Penerapan pendidikan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. *PERMAI*, 2(2).